

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, A., 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cetakan 6, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Downes, John dan Jordan Elliott Goodman, 1994, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Alih bahasa: Soesanto Budhidarmo, Penerbit Elex Media Komputendo, Jakarta.
- Erawaty, A.F. Elly dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, ed. pendahuluan, Jakarta.
- Friedman, W., 1996, *Teori dan Filsafat Umum* Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, ed. 8, Penerbit West Publishing, St. Paul, Minn
- Gautama, Sudargo, 1995, *Indonesian Business Law*. Cet. 1, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 1985, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Penerbit Binacipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*. Cet. 9, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed. 1-2, cet. 1, Penerbit Rajawali Pers Jakarta.
- Himawan, Charles, 1980, *The Foreign Investment Process in Indonesia*. 1st Ed. Penerbit Gunung Agung, Singapura.
- Kairupan, David, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, cet. 2 (rev), Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Margono, Sujud, 2008, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, cet. 1, Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum* Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Penerbit PT. Rajawali, Jakarta.
- Ochtorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Republik Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Sadli, Moh, 1972, "Foreign Investment in Developing Countris, Indonesia" dalam *Direct Investment in Asia and Pacific*. Edited by Peter Dysdate. Penerbit Australia Natioanal University Press, Canberra.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta*. Cet.3. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1 Cet. 15. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sornajah, M., 2004, *The International Law of Foreign Investment*. 2nd Ed. Penerbit Cambridge.

Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Penerbit PT. Intermasa, Jakarta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Cet.34, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 13. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparji, 2008, *Penanaman Modal Asing di Indonesia, Insentiv v. Pembatasan*. Cet. Penerbit Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris* cet. 4 Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2006, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, Cet. 13, Penerbit PT Adi Mahasatya, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 2006, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 221)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pemberian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Koordianasi Badan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas).

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 05 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2014.)

Tesis

Lantu, Ivan Gelium, “Peranan Notaris Dalam Perubahan Perseroan Terbatas Non Fasilitas Menjadi Penanaman Modal Asing” (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta: 2010).

Latief, Herlina. “Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Praktek Nominee di Indonesia.” (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2010)

Sahabati Miggi, “Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemberi Kuasa Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Kewarganegaraan.. (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2011)

Karina, Nadia. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemegang Saham Minoritas Terkait Aksi Korporasi Perseroan Terbuka Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) (Studi Kasus: PUT III PT. XYZ TBK)

Makalah/Artikel

Widjaja, Gunawan. “Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanama Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik” dalam *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* (Volume III Edisi 4, Agustus-Desember 2008).

Yudara, N.G., “Notaris dan Permasalahannya, Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia,” (makalah disampaikan pada Kongres XIX dan Upgrading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25-28 Januari 2006)

Indonesia, Ikatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005.

Internet

Absynia Law, “Definition and Nature of Investment Law”, <http://www.abysinnialaw.com/root/site/article/486/definition-and-nature-of-investment-law>, diakses pada tanggal 29 Juni 2014

Bank Indonesia, “Kamus” (<http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=A>) diakses pada tanggal 6 Januari 2015.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Perekonomian Yang Sehat”, <http://www.bkpm.go.id/contents/general/4/perekonomian-yang-sehat#.VJeWKV4Ac>, diakses pada tanggal 22 Desember 2014.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, “Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi SABH 2014” (http://portal.ahu.web.id/index.php/publikasi/berita/berita-sabh/item/download/v50_62ae9643899d470ca3956f7e5933f1ad), diunduh pada tanggal 20 Januari 2015, halaman 6.

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (a), “Panduan Penggunaan Aplikasi Peseroan Terbatas” (http://panduan.ahu.web.id/doku.php?id=peseroan_terbatas), diunduh pada tanggal 18 Januari 2015, halaman 30.

Okezone, “Dalam 8 Tahun Investasi Asing Naik 463%”, <http://economy.okezone.com/read/2014/03/31/20/963132/dalam-8-tahun-investasi-asing-naik-463>, diakses pada tanggal 22 Desember 2014.